

ANALISIS TIPOLOGI DAN HUBUNGAN ANTARA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAMBANG BEMBY. S; ABDUL BASHIR

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

The aim of this research is to see the dynamic of economic growth within two types of typology year of 2007-2012, and the connection pattern of economic growth and Human Development Index in Province of South Sumatera. Analyzing methods which used in this research are qualitative and quantitative descriptive analysis, research by Klassen typology analysis technique, and Rank Spearman Correlation. The result can be concluded if economic growth typology and HDI showed that (1) region which include in high level economic growth and HDI classification is Palembang. This also strengthen Palembang top position in region competing level; (2) regions which in the second quadrant with low level economic growth and HDI classification are District of Lahat, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, East OKU, and also the city of Lubuk Linggau; (3) regions which in high level of HDI classification, but low level in economic growth are District of South OKU, Ogan Komering Ulu, the city of Pagar Alam, and also Prabumulih; (4) on the other hand District of Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, and Musi Rawas included as low level of economic growth and HDI. The mathematical result showed that the role of district or city economic growth is not supported to push up the level of economic growth. It showed from the value of $r = 0.600$ or equal to 60 percent. The low role of human resource to economic growth indicated the low intention from the government to the human resource development.

Keywords: Human Development Index, Economic Growth, Typology, Spearman Correlation.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Secara ekonomi Sumatera Selatan diuntungkan karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menyebabkan kemampuan perekonomian Sumatera Selatan untuk melakukan ekspor hasil produksinya keluar daerah/luar negeri. Berdasarkan data BPS selama periode 2003-2012, neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan trend yang terus meningkat, ditunjukkan oleh nilai ekspor yang selalu tumbuh lebih tinggi dibanding impor. Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 26,03

persen. Pada tahun 2009, krisis finansial global telah mengakibatkan harga komoditas menjadi turun sehingga berdampak pada perekonomian Sumatera Selatan. Nilai ekspor dan impor turun drastis menyebabkan pertumbuhan ke level negatif. Namun pada tahun 2010 neraca perdagangan Sumatera Selatan kembali stabil bahkan tumbuh pesat di tahun 2011 walaupun kemudian sedikit menurun di tahun 2012. Sedangkan jumlah impor Sumatera Selatan relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 47,26 persen. Selisih pertumbuhan antara nilai ekspor dan impor yang besar ini telah membuat surplus neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,40 persen.

Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. *Pertama*, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antardaerah. *Kedua*, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Sumatera Selatan maupun antardaerah, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan. Perkembangan perekonomian di Sumatera Selatan tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional dan dunia. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2008-2012 pertumbuhan ekonomi tanpa migas rata-rata sebesar 6,57 persen per tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata dengan migas hanya sebesar 5,27 persen. Pola pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa sektor non migas menjadi penggerak utama bagi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kegiatan di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dalam upaya meningkatkan pembangunan yang lebih baik. Di dalam pembangunan, perkembangan wilayah merupakan suatu hal yang harus diterima dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan ditimbulkan. Perkembangan wilayah dapat terjadi karena adanya suatu perkembangan peradaban dan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas sumberdaya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

IPM Provinsi Sumatera Selatan meningkat selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan selalu lebih tinggi di atas nilai IPM nasional. Pada tahun 2011 mencapai 73,42 lebih tinggi dari nilai IPM nasional 72,77. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Selatan secara rata-rata nasional lebih baik. Dengan membandingkan nilai IPM provinsi lainnya nilai IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah. Nilai IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi belum termasuk peringkat tinggi. Peningkatan nilai IPM ditentukan oleh perbaikan nilai komponen pembentuk IPM. Angka Harapan Hidup meningkat dari 67,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,80 tahun pada tahun 2011 menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat sebagai gambaran perbaikan derajat pendidikan masyarakat. Daya beli masyarakat Sumatera Selatan juga meningkat sebagai wujud perbaikan kehidupan ekonomi

masyarakat. Berdasarkan uraian di atas kajian penelitian bertujuan antara lain (1) untuk mengetahui dinamika pertumbuhan ekonomi pada dua jenis tipologi tahun 2007-2012, (2) mengetahui pola hubungan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan menyangkut perkembangan berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan pendapatan. Berbeda dengan pembangunan ekonomi, yang mengandung arti lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan daerah atau pendapatan regional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun tertentu. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi daerah yang terjadi dari tahun ketahun. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah kita harus membandingkan pendapatan daerah tersebut dari tahun ke tahun.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas harga konstan. Kalau perhitungan pendapatan daerah menggunakan tingkat harga yang berlaku pada waktu tersebut, hasil perhitungannya adalah pendapatan daerah menurut harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Jadi perhitungan pendapatan daerah dapat menggunakan harga konstan (pendapatan riil), dapat pula menggunakan harga yang berlaku saat itu (pendapatan nominal).

Tiga ciri pertumbuhan ekonomi yaitu laju pertumbuhan pendapatan per kapita dalam arti nyata, persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya dan persebaran penduduk (Djojohadikusumo, 1994). Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill mengemukakan ada perubahan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan pendapatan per kapita yang tinggi. Untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah (Sjafrizal, 1997: 27-37). Kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah atau daerah yang bersangkutan.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Sejalan dengan itu pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Konsep pembangunan yang mendasar didalamnya terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi antara lain: (1) Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera, (2) Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, serta sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, (3) Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang, suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian Terdahulu

Pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara di dalam menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya, dimana pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan kesesuaian ideologis yang dibutuhkan (Kuznets 1971; Arsyad, 2010). Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan investasi. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi modal manusia. Investasi fisik (*physical investment*) merupakan semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru di masa mendatang (Mankiw, 2000).

Investasi modal manusia (*human capital investment*) merupakan suatu nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri setiap tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan (Scultz, 1961; Sjafii, 2009: 59). Terminologi pembangunan manusia dalam *Human Development Index Report* (2001) adalah proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Pendapatan merupakan salah satu pilihan, tetapi faktor yang lebih penting lainnya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak. Manusia merupakan aset kekayaan riil suatu bangsa serta merupakan aspek penting dalam pembangunan dan juga merupakan subyek pembangunan itu sendiri.

Suatu pola daya saing antardaerah sebagai berikut: peringkat teratas di dominasi oleh kabupaten/kota lama sementara itu peringkat terbawah ditempati daerah-daerah baru hasil pemekaran (Sukanto, 2007). Kota Palembang memiliki peringkat teratas, daerah ini memiliki peringkat utama disemua indikator utama. Selanjutnya berturut-turut Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur

Laporan *Human Development Report* (HDR) yang dipublikasikan oleh UNDP (1990) secara jelas menekankan bahwa pembangunan manusia di tingkat global, nasional, maupun daerah yang berpusat pada manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Ranis (2004) memberikan pendapatnya mengenai pembangunan manusia yang memiliki efek penting pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia dapat dilihat sebagai suatu aspek yang mungkin dapat mempengaruhi

maksimalisasi keuntungan. Dengan demikian, pembangunan manusia selalu berhubungan dengan modal manusia, sedangkan modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga pembangunan manusia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Cara paling efektif di dalam pembangunan manusia berkelanjutan adalah dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dengan pemerataan pendapatan (UNDP, 1999).

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling berkontribusi satu sama lain. Kontribusi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi ekonomi sehingga output masyarakat juga akan meningkat (Ranis, 2004). Sementara itu, kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia (Kosack dan Tobin, 2006; Bosman, 2010).

Investasi ini ditujukan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, meningkatkan perolehan keterampilan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta mampu mengembangkan kemajuan teknologi (Bosman, 2010). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa antara kedua indikator tersebut memiliki hubungan yang erat (De Gregorio et al., 2004). Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memberikan pengaruh baik pula bagi pembangunan manusia. Sebaliknya, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik dapat menjadikan kinerja perekonomian yang semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian meliputi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ini sebagai metode yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kongkrit, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan tahunan statistik perekonomian Sumatera Selatan tahun 2007-2012 yang berupa data PDRB, data investasi sebagai data pendukung yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal (BPM), serta data mengenai PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota.

Untuk mempermudah dalam analisis secara spasial, maka teknik analisis yang akan digunakan adalah *Klassen Typology* untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat menggunakan *Klassen Typology*. Sjafrizal (1997); Kuncoro, (1999) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat karakteristik pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah maju dan bertumbuh cepat (*rapid growth region*), daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), daerah sedang bertumbuh (*growing region*), dan daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), yaitu (a) *low growth, high income*, (b) *high growth, high income*, (c) *high growth, low income*, (d) *low growth, low income*. Penyajian secara matrik dari alat analisis Tipologi Klassen oleh Sjafrizal (1997) dapat disimak dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen

LP IPM (r)	PDRB/kapita (y)	
	(y ₁ > y)	(y ₁ < y)
(r ₁ > r)	Daerah maju dan bertumbuh cepat	Daerah sedang bertumbuh
(r ₁ < r)	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber : Sjafrizal, (1997: 30)

Keterangan: r₁ = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota; r = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota; y₁= Pendapatan per kapita kabupaten/kota; dan y = Rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota

Untuk melihat karakteristik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian kemudian mengadopsi Klasifikasi Klassen, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi diubah menjadi IPM. Cara yang digunakan untuk mengetahui karakteristik IPM Kabupaten/kota adalah memanfaatkan dan menggabungkan secara sistematis IPM dan PDRB per kapita rata-rata selama periode penelitian. Melalui analisis ini dapat diketahui karakteristik IPM di 15 Kabupaten/Kota dibandingkan dengan IPM rata-rata kabupaten/kota selama periode penelitian. Disebut 'tinggi' apabila indikator suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan; digolongkan 'rendah' apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pola dan struktur IPM kabupaten/kota akan dapat dibedakan menjadi salah satu dari empat karakteristik yang ada yaitu (Kuncoro, 2002):

- (1) Daerah bertumbuh cepat (*rapid growth region*) atau daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusia yang tinggi, jika IPM dan tingkat pendapatan per kapita 14 Kabupaten/kota lebih tinggi dari IPM dan tingkat pendapatan per kapita rata-rata kabupaten/kota;
- (2) Daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*) atau daerah dengan pendapatan tinggi namun pembangunan manusianya rendah, jika IPM lebih kecil dari IPM rata-rata kabupaten/kota dan tingkat pendapatan per kapita 14 Kabupaten/Kota lebih tinggi dari tingkat pendapatan per kapita rata-rata kabupaten/kota;
- (3) Daerah sedang tumbuh (*growing region*) atau daerah dengan pembangunan manusia tinggi namun pendapatannya rendah, jika IPM 14 Kabupaten/Kota lebih tinggi dari IPM rata-rata kabupaten/kota dan tingkat pendapatan per kapita rata-rata lebih rendah dari pendapatan per kapita rata-rata kabupaten/kota;
- (4) Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) atau daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusianya rendah, jika IPM dan tingkat pendapatan per kapita 14 Kabupaten/kota lebih rendah dari IPM dan tingkat pendapatan per kapita rata-rata kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk mengetahui pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, maka perhitungan menggunakan formula korelasi *rank Spearman* (Mustapa, 2002: 13). Formula korelasi peringkat *spearman* sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left(\frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)} \right)$$

Keterangan: r_s : Koefisien korelasi rank order; 1 dan 6: bilangan konstan; dan d: perbedaan antara pasangan jenjang; n : jumlah sampel

Bila koefisien korelasi r_s bernilai nol, maka tidak ada korelasi, dan bila r_s bernilai positif satu atau negatif satu, maka terdapat korelasi sempurna.

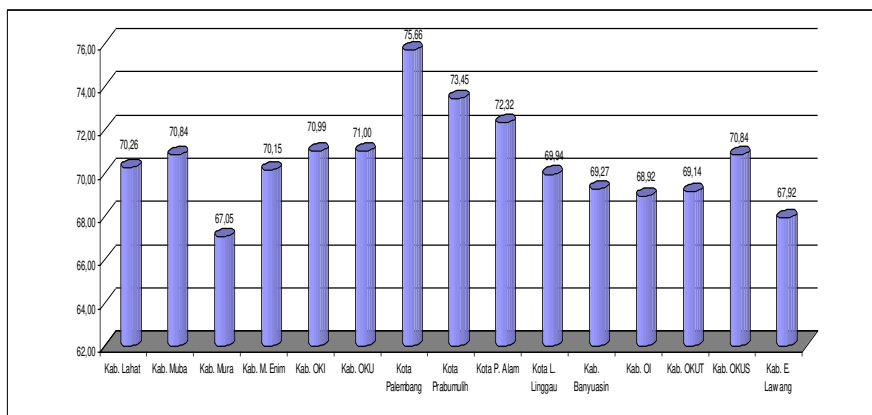
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dimana elemen-elemennya secara tegas mengarah pada sasaran yang ingin dicapai yaitu hidup secara sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup layak. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran, juga perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun tidak semua aspek pembangunan manusia dapat diukur melalui penghitungan IPM mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia, tetapi paling tidak IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan manusia yang sangat mendasar yaitu; derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat.

Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing Provinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota. Berdasarkan skala nilai mulai dari 0 (terburuk) sampai dengan 100 (terbaik) didapatkan rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2007 menunjukkan angka 70,40, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 73,42. Angka IPM tertinggi tahun 2007 diperoleh Kota Palembang (74,94), sedangkan IPM terendah di miliki Kabupaten Musi Rawas (66,31). Kemudian pada tahun 2011 Kota Palembang masih mencapai IPM yang tertinggi yaitu sebesar (76,69), sedangkan IPM terendah terdapat di Kabupaten Musi Rawas yaitu sebesar (68,38).

Sejalan dengan itu, rata-rata pertumbuhan angka IPM Kabupaten/Kota tahun 2007-2011 secara umum sebesar 0,92 persen yaitu berkisar 0,46–1,50 persen. Rata-rata pertumbuhan angka IPM tertinggi diperoleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (1,50 persen) dan terendah Kabupaten Ogan Komering Ilir (0,48 persen). Daerah yang pertumbuhan IPMnya di bawah rata-rata keseluruhan yaitu Kabupaten Banyuasin (0,83), Kabupaten OKU Selatan (0,80), Kabupaten Empat Lawang (0,75), Kota Prabumulih (0,90), Kota Pagar Alam (0,91) dan Kota Palembang (0,75), Kabupaten Musi Banyuasin (0,87), Kabupaten Musi Rawas (0,88), Kabupaten Muara Enim (0,61), Kabupaten OKI (0,48), dan Kabupaten OKU (0,89). Melihat dikomposisi ini ternyata daerah yang pertumbuhannya relatif kecil merupakan daerah yang mengalami pemekaran (Tabel 4.15). Menurut UNDP meningkatnya pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan besaran IPM. Berdasarkan klasifikasi tersebut secara umum rata-rata IPM seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2005-2009 masuk ke dalam strata menengah atas ($67,14 < IPM < 80$). Rata-rata angka IPM periode 2005-2009 menunjukkan angka terendah sebesar 67,14 (Kabupaten Empat Lawang) dan angka tertinggi 74,48 (Kota Palembang).



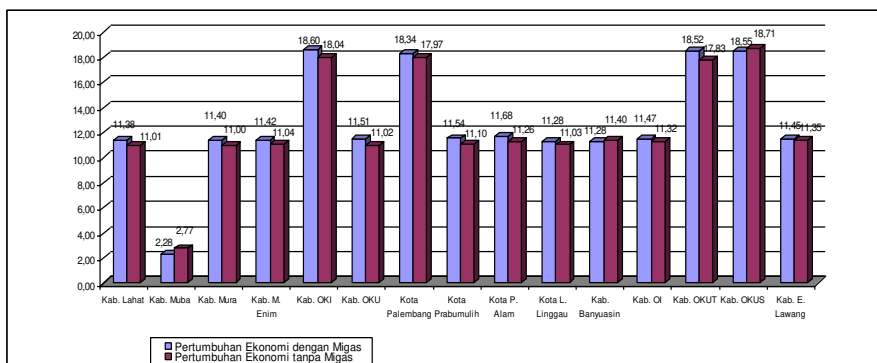
Gambar 1. Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2007-2012

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2011 (Diolah)

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ada tiga unsur penting dari IPM, variabel kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah/daerah (semakin tinggi pendapatan riil rata-rata per kapita), semakin besar angka harapan hidup dan semakin rendah angka kematian bayi di wilayah tersebut (Tambunan, 2003). Pendidikan diukur dengan angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama sekolah, sementara itu pendapatan diukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan kemampuan belanja dari suatu nilai mata uang atau tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita.

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pengukur keberhasilan pembangunan sekaligus penentu arah kebijakan di masa yang akan datang. Secara riil fluktuasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tergambar melalui penerahan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah di tentukan oleh faktor lokal dan eksternal. Faktor lokal meliputi: Ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, permodalan dan kewirausahaan. Sedangkan factor eksternal diantaranya ialah perkembangan situasi perekonomian nasional maupun internasional serta berbagai kebijakan pemerintah baik yang berkaitan dengan sektor riil maupun moneter.



Gambar 2. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2007-2011 (Persen)

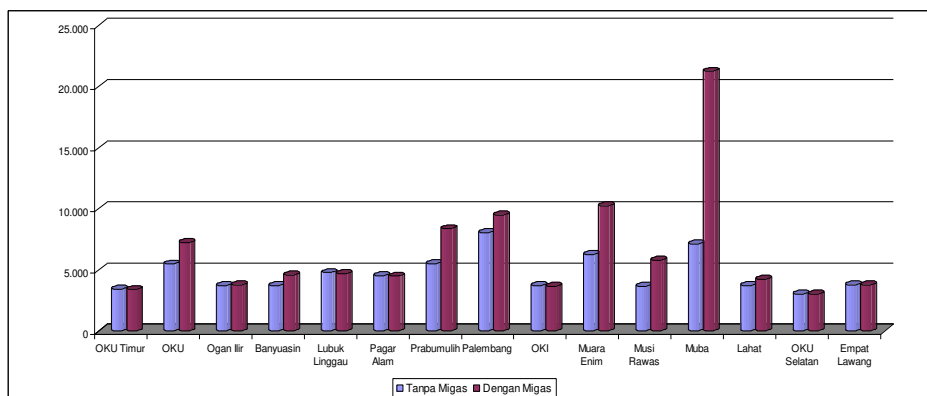
Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Selatan (Diolah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumsel periode 2005-2009 dengan migas berkisar antara 2 persen sampai 18 persen, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi dialami Kabupaten OKI (18,60 persen) dan pertumbuhan ekonomi terkecil dialami Kabupaten Musi Banyuasin (masing-masing 2,28 persen). Hal ini menunjukkan kontribusi sektor migas terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin cukup besar. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi dialami Kabupaten OKU Selatan (18,71 persen) sedangkan pertumbuhan ekonomi terkecil dialami Kabupaten Musi Banyuasin (2,77 persen), hal ini juga mengindikasikan di kontribusi sektor non migas terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tidak ada (Gambar 2).

PDRB per kapita suatu kabupaten/kota, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi di suatu wilayah, besar PDRB atas harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini mendekripsikan nilai tambah yang diciptakan oleh masih-masing penduduk akibat dari proses produksi. Adanya kenaikan PDRB per kapita menunjukkan bahwa secara nominal pendapatan masyarakat pada umumnya mengalami kenaikan. Tinggi rendahnya PDRB per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah serta jumlah penduduk daerah tersebut.

Dilihat dari sisi pendapatan perkapita, pendapatan perkapita Sumatera Selatan pada tahun 2012 atas harga berlaku dengan migas adalah sebesar Rp. 22,68 juta lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 20,40 juta Sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas tahun 2012 sebesar Rp. 17,23 juta, juga lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 15,03 juta. Dengan memperhitungkan faktor nilai tukar rupiah terhadap US dollar (USD) (1 US\$ = Rp.9.900,-), pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 dengan migas setara dengan US\$ 2.291 lebih tinggi dari capaian pendapatan perkapita pada tahun 2011 yang sebesar US\$ 2.061. Pendapatan perkapita tanpa migas tahun 2012 sebesar US\$ 1.740, lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar US\$ 1.518.

Gambaran rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota tahun 2007-2011, rata-rata PDRB per kapita dengan migas tertinggi dialami Kabupaten Musi Banyu Asin dengan PDRB per kapita sebesar Rp 21,434 ribu dan PDRB terkecil dialami Kabupaten OKU Selatan dengan PDRB per kapita sebesar Rp 3.619 ribu. Tingginya pendapatan per kapita dengan Migas di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh relatif besarnya kontribusi sektor migas terhadap PDRB daerah tersebut. Rendahnya PDRB Kabupaten OKU Selatan disebabkan rendahnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, rata-rata kontribusi migas hanya berkisar 1 sampai dengan 1,5 persen.



Gambar 3. Rata-rata PDRB Perkapita Tanpa Migas & Dengan Migas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2007-2011 (dalam ribu)

Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)

Kendati pun demikian apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita dengan migas, Kabupaten Lahat memiliki pertumbuhan paling tinggi (31,49 persen), sedangkan terkecil Kabupaten Musi Banyuasin hanya -0,82 persen. Sementara itu apabila dilihat dari PDRB per kapita tanpa migas, Kabupaten Lahat memiliki pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi (28.66 persen) dan terendah dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang 8,48 persen. PDRB per kapita tanpa migas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan berkisar Rp.3.611 ribu - Rp.10.176 ribu, dengan rata-rata pertumbuhan 12,07 persen. Nilai PDRB per kapita tertinggi dimiliki oleh Kota Palembang, dan terkecil masih dimiliki oleh Kabupaten OKU Selatan.

Berdasarkan Gambar 3 di atas menunjukkan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001 sampai dengan 2009, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diketahui bahwa secara kondisi rata-rata terjadi ketidakmerataan pendapatan perkapita antardaerah antara daerah yang kaya dengan minyak dan gas (migas) dengan daerah yang tidak ada sumber daya alam migas. Jika dilihat rata-rata PDRB Perkapita dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin yang sangat besar dan PDRB perkapita terkecil adalah Kabupaten OKU Selatan, kemudian jika dilihat dari rata-rata PDRB perkapita tanpa migas Kabupaten OKU Selatan juga masih terkecil, sedangkan Kota Palembang yang terbesar karena sebagian besar sumber daya dan tingkat pembangunan tersebut ada di Kota Palembang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

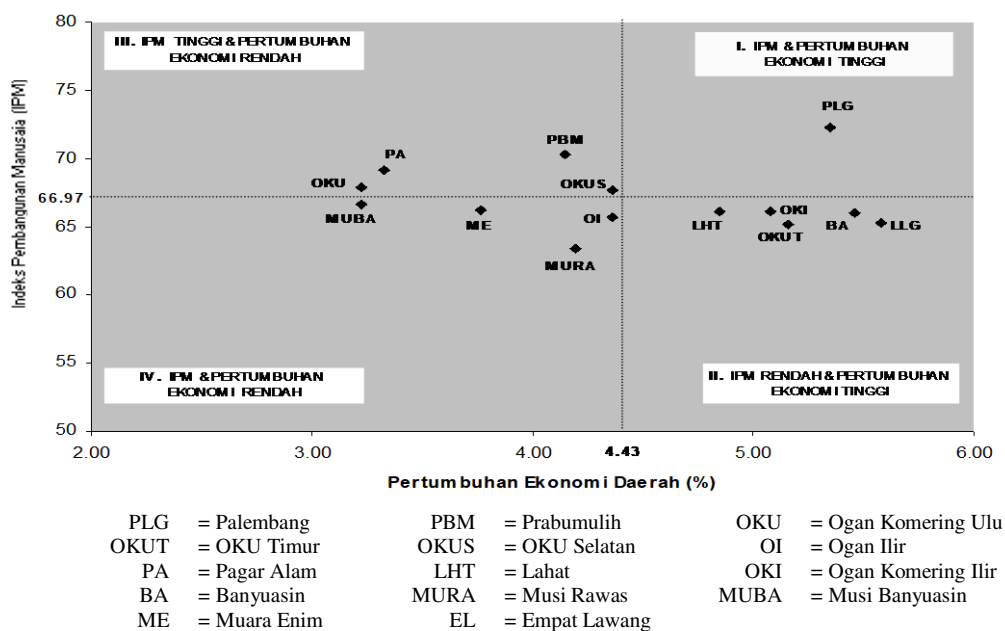
Analisis Tipologi Daerah

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.

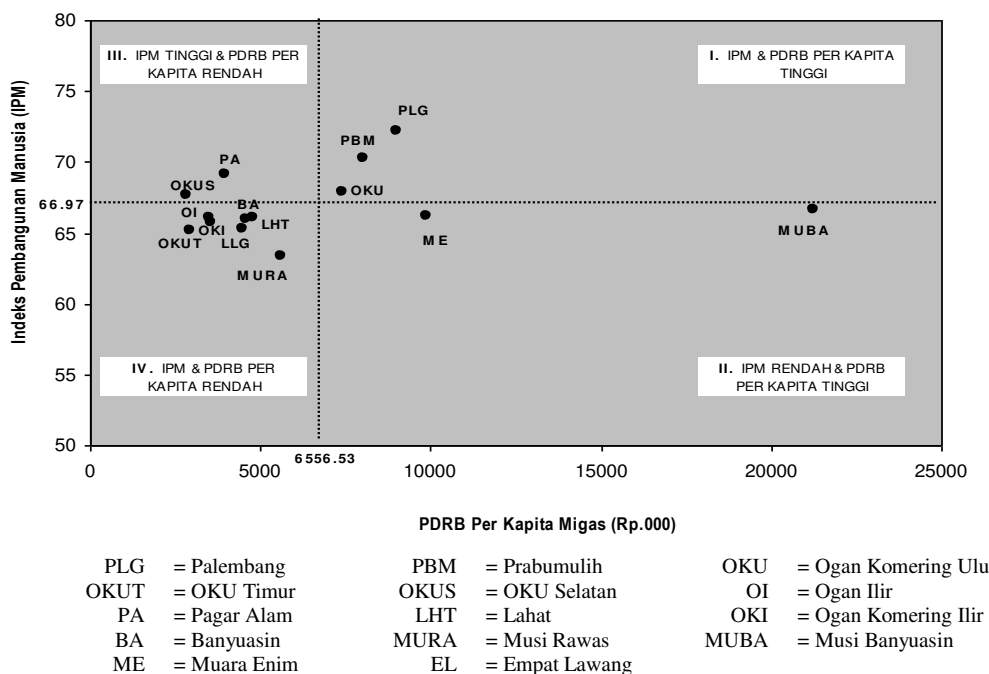
Untuk melihat karakteristik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian kemudian mengadopsi Klasifikasi Klassen, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi diubah menjadi IPM. Cara yang digunakan untuk mengetahui karakteristik IPM Kabupaten/kota adalah memanfaatkan dan menggabungkan secara sistematis IPM dan PDRB per kapita rata-rata selama periode penelitian. Melalui analisis ini dapat diketahui karakteristik IPM di 15 Kabupaten/Kota dibandingkan dengan IPM rata-rata kabupaten/kota selama periode penelitian. Disebut 'tinggi' apabila indikator suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan; digolongkan 'rendah' apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembahasan ini dilakukan pemetaan tipologi daerah terhadap 15 kabupaten/kota.

Berdasarkan pengelompokan daerah ke dalam empat kuadran. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat bahwa tipologi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan hal-hal sebagai berikut : (1) daerah yang termasuk dalam klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi adalah Kota Palembang. Hal ini sekaligus menguatkan posisi Kota Palembang berada di posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi daerah; (2) daerah yang berada pada kuadran kedua dengan klasifikasi pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah adalah Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Timur, dan Kota Lubuk Linggau; (3) daerah yang berada dalam klasifikasi daerah dengan IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Kabupaten OKU Selatan, Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, serta Kota Prabumulih; (4) sementara itu Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir dan Musi Rawas, dan Empat Lawang termasuk dalam

Pertumbuhan dan IPM yang rendah. Berdasarkan analisa empat kuadran terlihat bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam justru memiliki angka IPM dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya nilai IPM ini terkait pula dengan indikator pembentuk IPM.



Gambar 4. Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 5. Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan IPM dan Pendapatan Per Kapita

Analisis Tipologi daerah didasarkan Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita, diperoleh tipologi daerah yang berbeda. Hasil pemetaan tersebut seperti pada Gambar 1. Klasifikasi empat kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) daerah dengan

pendapatan per kapita dan IPM tinggi (kuadran I) yaitu: Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu; (2) daerah dengan pendapatan tinggi dan IPM rendah (kuadran II) yaitu: Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Muba; (3) daerah dengan IPM tinggi dan pendapatan per kapita rendah (kuadran III) yaitu Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Selatan; (4) kelompok terakhir mempresentasikan daerah dengan IPM dan pendapatan per kapita rendah (kuadran IV) yaitu: Kabupaten Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Lahat, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau.

Berdasarkan Gambar 4 dan 5 mendeskripsikan bahwa Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan tergolong dalam daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi. Tentu ada alasan kuat kenapa untuk ketiga unsur tersebut Kota Palembang menunjukkan prestasi paling baik diantara daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan fasilitas-fasilitas publik untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, ditambah lagi dengan peran swasta dalam penyediaan fasilitas-fasilitas yang sama seperti rumah sakit swasta dan sekolah-sekolah (dari taman kanak-kanak hingga SMA) dan perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta (PTS), serta pembangunan infrastruktur memang lebih baik di Kota Palembang dibandingkan di kawasan lainnya terutama daerah baru hasil pemekaran.

Selain itu dari hasil pemetaan tersebut menarik untuk diamati adalah beberapa daerah yang tergolong dalam kuadran keempat. Secara teori daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan memiliki nilai IPM yang tinggi pula, namun ini hal tersebut belum terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. Walaupun pendapatan per kapita kedua daerah tersebut tinggi akan tetapi IPMnya justru relatif rendah. Hal ini mengindikasikan pendapatan per kapita yang tinggi di kedua daerah tersebut terdapat ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat dari besarnya sumbangan sektor migas terhadap pembentukan PDRB kedua daerah ini. Sifat sektor pertambangan dan migas yang padat modal menyebabkan sektor ini relatif kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Khusus untuk Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan penelitian Nurlina (2014) yang menyatakan 40 persen terbawah penduduk Kabupaten Muba menikmati pendapatan Rp105 ribu-Rp640 ribu (24 persen), 40 persen sederhana menikmati pendapatan Rp645 ribu-Rp980 ribu (39,56 persen), jika kedua klasifikasi ini dijumlahkan 73,65 persen penduduk Kabupaten Muba yang menikmati pendapatan yang rendah. Di pihak lain 5 persen berpendapatan paling tinggi menerima 14,65 persen dari seluruh pendapatan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Muba. Faktor ini diduga kuat menjadi alasan IPM di daerah tersebut rendah, selain tingginya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Inflasi yang tinggi berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat karena menyebabkan pendapatan riil masyarakat berkurang. Sementara itu hal serupa ditunjukkan Kabupaten Muara Enim, daerah ini memang mempunyai nilai yang baik dari indikator pendidikan, akan tetapi pertumbuhannya mengalami 'stagnan'. Pada tahun 2011 angka melek hurufnya tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi pertumbuhannya nol, sedangkan rata-rata lama sekolah hanya 7,3 tahun sama dengan rata-rata lama sekolah daerah secara umum. Hal ini berarti rata-rata penduduk daerah ini hanya lulus sekolah dasar. Suatu dilema pula angka harapan hidup Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah rata-rata angka harapan hidup kabupaten/kota (66,6 tahun < 67,4 tahun).

Analisis Korelasi Spearmen

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau dalam ilmu ekonomi lazim disebut mutu modal manusia (Ranis, 2004). Konsep mutu modal manusia sendiri mengacu pada suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi, serta biaya untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa yang akan datang (Ananta, 1993: 54).

Peningkatan kualitas modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan 2 faktor penentu yang seringkali disebutkan dalam beberapa literatur, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dalam arti luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan mempengaruhi kualitas modal manusia, baik pada level mikro maupun level makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan-pelatihan banyak, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Ramirez, et.al, 1998; Brata, 2004).

Dengan demikian keterkaitan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari 2 (dua) arah, yaitu hubungan dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan hubungan dari pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak bisa dianggap linier atau langsung, namun ditentukan oleh sejauhmana peranan faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep tersebut. Di bawah ini akan diuraikan lebih terperinci keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, baik hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia serta sebaliknya, pengaruh pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, beserta faktor-faktor yang mengaitkan keduanya.

Untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, maka digunakan perhitungan korelasi diantara masing-masing peringkat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia daerah kabupaten/kota. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan belum berperan kualitas sumber daya manusia (IPM) menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari nilai $r = 0,600$ atau 60 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara statistik IPM tidak mempunyai hubungan yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Korelasi Spearman Rank

Rank Spearman Correlation 2007-2012		LPE	IPM	
<i>Spearman's rho</i>	LPE	Correlation Coefficient	1.000	.600
		Sig. (2-tailed)	.	.208
		N	6	6
IPM		Correlation Coefficient	.600	1.000
		Sig. (2-tailed)	.208	.
		N	6	6

Sumber: data diolah

Menurut Sugiyono (2010) rentang koefisien korelasi r bernilai (0.41 - 0.70) artinya mempunyai hubungan yang cukup erat. Masih rendahnya kontribusi kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Walaupun disadari beberapa daerah mempunyai PDRB, pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan yang tinggi akan tetapi apabila dipetakan (tipologi daerah) hanya Kota Palembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi, sedangkan daerah lain menunjukkan fenomena yang beragam. Sejalan dengan penelitian Sukanto (2007) yang menyatakan bahwa rendahnya hubungan (r) antara nilai kinerja perekonomian dengan kualitas sumber daya manusia (IPM) yaitu sebesar 0,125 atau 12,5 persen, dapat pula disimpulkan bahwa kinerja perekonomian belum mampu mendukung kualitas SDM. Memang dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kinerja perekonomian yang baik mampu meningkatkan kualitas SDM yang baik, tetapi juga sebaliknya yaitu karena kualitas sumber daya manusia yang baik maka kinerja perekonomian akan menjadi baik.

Namun interpretasi yang paling utama adalah jika suatu daerah ingin membangun perekonomian maka kualitas sumber daya manusia jangan diabaikan, demikian pula sebaliknya jika ingin mengembangkan SDM, juga tidak bisa mengabaikan kinerja perekonomian. Suatu catatan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi era *glokalisasi*. Persaingan tidak saja antardaerah akan tetapi negara lain. Hasil perhitungan dengan menggunakan *rank spearman* tersebut mengindikasikan bahwa perlunya perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (IPM), sehingga kontribusinya akan berdampak baik dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dimaknai jika suatu daerah pertumbuhan ekonominya ingin lebih baik, maka kualitas sumber daya manusia (IPM) tersebut jangan diabaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil perhitungan secara keseluruhan menunjukkan tipologi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan hal-hal sebagai berikut : (1) daerah yang termasuk dalam klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi adalah Kota Palembang. Hal ini sekaligus menguatkan posisi Kota Palembang berada di posisi teratas dalam peringkat daya saing daerah; (2) daerah yang berada pada kuadran kedua dengan klasifikasi pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur serta Kota Lubuk Linggau; (3) daerah yang berada dalam klasifikasi daerah dengan IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, serta Kota Prabumulih; (4) sementara itu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam Pertumbuhan dan IPM yang rendah. Berdasarkan analisa empat kuadran terlihat bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam justru memiliki angka IPM dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya nilai IPM ini terkait pula dengan indikator pembentuk IPM.

Hasil tipologi daerah didasarkan Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita, diperoleh tipologi daerah yang berbeda. Hasil pemetaan tersebut seperti pada Gambar Klasifikasi empat kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM tinggi (kuadran I) yaitu: Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu; (2) daerah dengan pendapatan tinggi dan IPM rendah (kuadran II) yaitu: Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Muba; (3) daerah dengan IPM tinggi dan pendapatan per kapita rendah (kuadran III) yaitu Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Selatan; (4)

kelompok terakhir mempresentasikan daerah dengan IPM dan pendapatan per kapita rendah (kuadran IV) yaitu: Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, dan Kota Lubuk Linggau.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan belum berperan kualitas sumber daya manusia (IPM) menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari nilai $r = 0,600$ atau 60 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara statistik IPM tidak mempunyai kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Rendahnya kontribusi kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Saran-saran

Pemerintah daerah perlu melakukan tindak lanjut yang serius baik bersifat vertikal maupun horizontal. Perbaikan vertikal dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah terhadap daerah lain. Namun sasaran ini belum tentu tercapai karena jika daerah lain melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik, maka bukan tidak mungkin sasaran vertikal peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak tercapai bahkan bisa menjadi turun. Dalam hal ini upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih bersifat horizontal. Artinya, walaupun secara vertikal tidak menjadi lebih baik tetapi secara kualitas masing-masing daerah akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah perlu mendorong peningkatan pendapatan daerah, sehingga belanja urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkat dan dapat mendorong peningkatan belanja modal untuk mendukung pendidikan dan kesehatan, hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kualitas SDM yang lebih baik dan mempunyai daya saing. Selanjutnya perlu mendorong dan membuat program peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM mutlak diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan investasi sosial di bidang pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan masyarakat.

Disadari bahwa dilihat dari sisi pengembangan konsep maupun dari sisi penerapannya dalam pengukuran hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi dalam bahasan ini masih banyak mengandung kelemahan, hal ini dikarenakan kurang tersedianya data. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat hubungan IPM dengan indikator ekonomi lainnya, mengingat fokus otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/kota, variabel yang dianggap relevan dalam hubungan indikator-indikator ekonomi antardaerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Ananta, Aris. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan*. Jakarta: LDFE-UI.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, 1-11.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bosman, Pieter. 2010. The Impact of Human Capital Development on Economic Growth. *Economica Journal*, 55 (1): 21-40.
- De Gregorio, J., Lee, J. W., Lederman, D., & Roubini, N. (2004). Growth and Adjustment in East Asia and Latin America. *Economía*, 5(1), 69-134.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 1999. *Pembangunan Regional di Indonesia Beberapa Catatan Menjelang Abad ke 21*. Unisia, No 31/XVI/III/I 1996: Yogyakarta

- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuznets, S. 1971. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*. 45(1): 1-30.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Erlangga
- Muta'ali, Luthfi. 2005. Potensi Perkembangan Wilayah Dan Kaitannya Dengan Tata Ruang Di Kawasan Lereng Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 19 No. 1. Yogyakarta.
- Ranis, Gustav. 2004. Human Development and Economic Growth. *Center Discussion Paper No. 887*. Amerika Serikat: Yale University.
- Scultz, T.W. 1961. Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1): 1-17
- Sjafii, Achmad. 2009. Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1): 59-76.
- Sukanto. 2007. Analisis Daya Saing Antar Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.. Tesis Tidak dipublikasikan. Palembang: Program Pascasarja Universitas Sriwijaya.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Sjafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma LP3ES*, 3: 27-38.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- UNDP, BPS, Bappenas. 2001. *Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Indonesia Human Development Report 2001*. Indonesia.
- UNDP. 1999. *UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned, Lesson Learned Series No. 1*, New York: UNDP Management Development and Governance Division.